

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada SKPD Kota Yogyakarta)**

***Sri Ayem; Ari Singgar Cahyani***

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi  
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta  
*E-mail: singgarari@gmail.com*

### **ABSTRACT**

The purpose of this study is to describe the effect of perceptions of the benefits of non-cash transactions, regional financial information systems, human resources, accrual-based government accounting standards on the quality of local government financial reports both simultaneously and partially. This type of research is quantitative descriptive. The sampling technique is purposive sampling. The population of this research is all employees of the Yogyakarta City government. Samples were taken from 15 SKPD with a total of 70 respondents. Data that can be processed is 57. Analysis of data using the classical assumption test (normality test, multicollinearity test and heteroscedasticity test) and multiple linear regression tests supported by the coefficient of determination test, simultaneous significance test and partial significance test. The results of this study indicate that the perception of the benefits of non-cash transactions, regional financial information systems, human resources, and accrual-based government accounting standards simultaneously influence the quality of local government financial reports. Partially the perception of the benefits of non-cash transactions and human resources does not affect the quality of local government financial reports. While the regional financial information system and accrual-based government accounting standards have a positive effect on the quality of local government financial reports.

**Keywords:** non-cash, information systems, human resources, accrual basis

**JEL Classification:** D53

### **PENDAHULUAN**

Fokus penting dari pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab sebagai salah satu wujud otonomi daerah. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa salah satu bentuk pertanggungjawabannya atas penyelenggaraan pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah adalah penyampaian laporan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), tujuan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor atas sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah.

!Berdasar IHPS I tahun 2018 menunjukkan

bahwa laporan keuangan pemerintah daerah di DIY masih terdapat permasalahan yang diungkapkan dalam rekapitulasi kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, tingginya Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kota Jogja TA 2018 menjadi perhatian penting peneliti dalam melihat pengelolaan keuangan daerah saat ini. Permasalahan terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang belum efektif dan efisien memunculkan beberapa risiko yang mengindikasikan adanya masalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal pertama yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah persepsi manfaat transaksi nontunai. Sebagai salah satu teknologi sistem pembayaran, implementasi transaksi nontunai pada pemerintah daerah dilakukan paling lambat 1 Januari 2018 (Permendagri No.910/186/SI). Optimalisasi sistem pembayaran nontunai diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan menekan kemungkinan terjadinya penggelapan (*fraud*), sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut (Zahari, Ariffin, Zamin, & Noor, 2014), meskipun terdapat persepsi manfaat kemudahan pembayaran elektronik pada pemerintah daerah, ada beberapa kekhawatiran terkait keamanan sistem *online*. (Denison, Hackbart, & Yusuf, 2013) menjelaskan bahwa pembayaran elektronik (*e-payment*) selain menawarkan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan, namun juga memunculkan dua tantangan utama yaitu (1) biaya pertukaran dan biaya terkait dengan penerimaan dan memproses pembayaran elektronik, (2) biaya kepada pihak ketiga yaitu penyedia kartu debit dan kartu kredit. Hal kedua yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah. Mengutip (Putri, 2017), kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem informasi keuangan daerah. pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan, mengurangi kesalahan pemrosesan data sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Teknologi informasi yang semakin berkembang pesat telah menawarkan berbagai kemudahan bagi penggunaannya. Meskipun demikian, implementasi dari

teknologi informasi tidaklah mudah. Kendala paling umum terkait pemanfaatan teknologi informasi yaitu biaya, infrastruktur dan sumber daya manusia.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan hal ketiga yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ditengah semakin kompleksnya pengelolaan keuangan daerah di era perkembangan teknologi informasi dan teknologi, dibutuhkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Menurut (Nurilah, 2014), dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Maka diperlukan optimalisasi kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain sumber daya manusia, hal keempat yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah penerapan SAP berbasis akrual. SAP berbasis akrual diamanahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 untuk dilaksanakan secara berhati-hati. Berlakunya SAP berbasis akrual dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belum menunjukkan bahwa pemerintah akan menerapkan sistem keuangan berbasis akrual secara penuh (Halim & Kusufi, 2017). Kompleksitas konsep dan praktik akuntansi akrual, membutuhkan kajian mendalam terkait kesiapan SDM serta sarana pendukung untuk mengelola keuangan daerah.

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik atas kepercayaan pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan keuangan.

Transaksi nontunai merupakan proses pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa APMK, cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya. Seluruh perkembangan sistem pembayaran baik perkembangan dari sisi alat pembayaran, transaksi, maupun penyelenggaraan sistem pembayaran itu sendiri memberikan konsekuensi terhadap tingkat risiko yang harus dikelola

oleh para pelaku sistem pembayaran (Bank Indonesia, 2008). *Theory Acceptance Model* mendasari pentingnya melihat persepsi manfaat dan kemudahan suatu teknologi baru untuk dapat menjelaskan penerimaan dan tindakan pengguna agar mencapai tujuan suatu teknologi diterapkan. Tujuan transaksi nontunai pada pemerintah daerah adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Menurut (Zahari et al., 2014), meskipun terdapat persepsi manfaat kemudahan pembayaran elektronik pada pemerintah daerah, ada beberapa kekhawatiran terkait keamanan sistem *online*. Pengambil keputusan lebih mempercayai laporan keuangan yang berasal dari ekonomi berbasis nontunai karena pengaruhnya terhadap pengurangan pajak, inflasi dan kebocoran pendapatan, lebih mudah mematuhi standar audit dan kinerja transaksi lebih efektif (Emengini, 2014). Sedangkan penelitian (Passas, 2018), pembatasan penggunaan uang kas melalui transaksi nontunai bukan merupakan solusi masalah akuntabilitas pengelolaan keuangan. Menurut (Shaykhutdinov, 2017), dibutuhkan literasi, regulasi, tata kelola dan pengawasan untuk mengurangi perkembangan negatif di dalam sistem pembayaran nontunai.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, bahwa informasi keuangan daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dimaksudkan untuk membantu proses penyusunan laporan keuangan secara lebih cepat, efektif dan efisien. Menurut (Yulianti & Agustini, 2016), kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah. Keberhasilan penerapan sistem informasi keuangan daerah dibutuhkan ketersediaan infrastruktur penunjang.

Sumber daya manusia merupakan individu yang memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut (Pamungkas, 2017), kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Keahlian di bidang akuntansi sebagai ilmu dasar penyusunan laporan keuangan sangat diperlukan, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang ingin terus belajar dan menguasai akuntansi seiring berkembangnya kegiatan ekonomi, sosial sampai dengan politik dalam pemerintah daerah. Sedangkan menurut (Hasibuan, 2018), sumber daya manusia ti-

dak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Teori kegunaan-keputusan (*Decision Usefulness Theory*) mencakup syarat kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam pengambilan keputusan pengguna informasi. Penyajian informasi perlu mempertimbangkan aspek-aspek dalam informasi akuntansi agar informasi yang disajikan memenuhi kebutuhan para pengambilan keputusan. Sikap manajemen terhadap suatu standar akuntansi memiliki hubungan dengan kepentingannya terhadap pengungkapan informasi akuntansi yang menggambarkan kinerja finansial dalam bentuk pelaporan keuangan (Silviana & Antoni, 2014). Penerapan SAP berbasis akrual dengan baik diperlukan agar pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel sehingga peningkatan kualitas laporan keuangan dapat tercapai (Bondan, Djahhuri, & Rosidi, 2017). Indikator SAP berbasis akrual dalam penelitian ini adalah penerapan atas pengakuan pendapatan dan penerapan atas pengakuan beban.

Berdasar landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>:** Persepsi manfaat transaksi nontunai berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H<sub>2</sub>:** Sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H<sub>3</sub>:** Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H<sub>4</sub>:** Penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H<sub>5</sub>:** Persepsi manfaat transaksi nontunai, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, kompetensi SDM, dan penerapan SAP berbasis akrual secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan data primer dengan kuesioner sebagai instrumen pengambilan data. Populasi penelitian adalah seluruh SKPD Kota Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sampel penelitian ini adalah pejabat penatausahaan keuangan, pejabat teknis kegiatan, dan bendahara dari 15 SKPD dengan total 70 responden. Data yang diolah adalah 57 kuesioner. Pengujian kualiti-

tas data dengan uji validitas dan reliabilitas. Analisis data dengan regresi linier berganda, uji signifikansi simultan dan uji signifikansi parsial.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan empat karakter kualitatif laporan keuangan, yaitu andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (PSAP 2010). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel, yaitu persepsi manfaat transaksi nontunai, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, kompetensi SDM dan SAP berbasis akrual.

Persepsi manfaat transaksi nontunai dalam penelitian ini diukur dengan indikator ketepatan atau keandalan (*accuracy or reliable*), keterbukaan (*transparency*) dan kemudahan (*convenience*) (Tazmi, Suwarsi, & Bayuni, 2017). Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah diukur dengan indikator proses akuntansi yang telah berbasis komputer, ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi, keterbukaan dan kemudahan akses informasi keuangan (Safiyulloh, 2017). Kompetensi sumber daya manusia

diukur dengan indikator pengetahuan (*knowledge*), pendidikan dan pelatihan (*education and training*), serta pengalaman (*experience*) (Safiyulloh, 2017). Penerapan SAP berbasis akrual dalam penelitian ini diukur dengan indikator penerapan atas pengakuan pendapatan dan penerapan atas pengakuan beban (Zuria, 2016).

**HASIL PENELITIAN**

Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan untuk menguji ketepatan dan konsistensi suatu instrument penelitian. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dan  $r_{tabel}$ . Nilai  $r_{hitung}$  merupakan *Corrected Item-Total Correlation*. Pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid apabila nilai  $r_{hitung}$  positif dan  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Sedangkan untuk uji reliabilitas dengan *Cronbach's Alpha* dimana variabel penelitian dikatakan reliabel atau andal jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Berdasar uji validitas pada Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. Berdasar uji reliabilitas pada Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian telah reliabel.

**Tabel 1**  
**Ringkasan Hasil Uji Validitas Atas Data Penelitian**

No.	Variabel/Indikator	$r_{tabel}$	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan
1.	Persepsi Manfaat Transaksi Nontunai			
	Pernyataan X <sub>1</sub> 1	0,2609	0,475	Valid
	Pernyataan X <sub>1</sub> 2	0,2609	0,596	Valid
	Pernyataan X <sub>1</sub> 3	0,2609	0,677	Valid
2.	Pernyataan X <sub>1</sub> 4	0,2609	0,676	Valid
	Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah			
	Pernyataan X <sub>2</sub> 1	0,2609	0,523	Valid
	Pernyataan X <sub>2</sub> 2	0,2609	0,512	Valid
	Pernyataan X <sub>2</sub> 3	0,2609	0,776	Valid
3.	Pernyataan X <sub>2</sub> 4	0,2609	0,681	Valid
	Pernyataan X <sub>2</sub> 5	0,2609	0,786	Valid
	Kompetensi Sumbe Daya Manusia			
	Pernyataan X <sub>3</sub> 1	0,2609	0,353	Valid
	Pernyataan X <sub>3</sub> 2	0,2609	0,311	Valid
	Pernyataan X <sub>3</sub> 3	0,2609	0,781	Valid

No.	Variabel/Indikator	$r_{\text{tabel}}$	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan
	Pernyataan X <sub>3</sub> 4	0,2609	0,867	Valid
	Pernyataan X <sub>3</sub> 5	0,2609	0,775	Valid
	Pernyataan X <sub>3</sub> 6	0,2609	0,642	Valid
	Pernyataan X <sub>3</sub> 7	0,2609	0,749	Valid
4.	Penerapan SAP Berbasis Akrua			
	Pernyataan X <sub>4</sub> 1	0,2609	0,497	Valid
	Pernyataan X <sub>4</sub> 2	0,2609	0,573	Valid
	Pernyataan X <sub>4</sub> 3	0,2609	0,543	Valid
	Pernyataan X <sub>4</sub> 4	0,2609	0,631	Valid
5.	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
	Pernyataan Y 1	0,2609	0,481	Valid
	Pernyataan Y 2	0,2609	0,655	Valid
	Pernyataan Y 3	0,2609	0,755	Valid
	Pernyataan Y 4	0,2609	0,444	Valid
	Pernyataan Y 5	0,2609	0,582	Valid
	Pernyataan Y 6	0,2609	0,782	Valid
	Pernyataan Y 7	0,2609	0,783	Valid
	Pernyataan Y 8	0,2609	0,730	Valid

Sumber: Data primer, diolah, 2018.

Tabel 2  
Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Atas Data Penelitian

	Cronbach's Alpha	Keterangan
Persepsi Manfaat Transaksi Nontunai	0,789	Reliabel
Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah	0,839	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,870	Reliabel
Penerapan SAP Berbasis Akrua	0,762	Reliabel
Kualitas LKPD	0,879	Reliabel

Sumber: Data primer, diolah, 2018.

Berdasar Tabel 3, nilai kolmogrov-smirnov Z sebesar 0,788 dengan nilai signifikan sebesar  $0,564 > \alpha (0,05)$ , dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Berdasar hasil uji multikolinieritas pada Tabel 4, nilai toleransi  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$ , dapat disimpul-

kan penelitian terbebas dari masalah multikolinearitas. Berdasar hasil uji glejser pada Tabel 5 nilai signifikansi masing-masing variabel independen  $> \alpha (0,05)$ , dapat disimpulkan bahwa data penelitian terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		57
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.73980536
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.104
	Negative	-.093
Kolmogorov-Smirnov Z		.788
Asymp. Sig. (2-tailed)		.564

Sumber: Data primer, diolah, 2018.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Persepsi Manfaat Transaksi Nontunai	.706	1.416	Tidak terjadi multikolinearitas
Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah	.498	2.009	Tidak terjadi multikolinearitas
Kompetensi SDM	.771	1.297	Tidak terjadi multikolinearitas
Penerapan SAP Berbasis Akrua	.530	1.886	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data primer, diolah, 2018.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.984	1.811		-1.648	.105
Persepsi Manfaat Transaksi Nontunai	.134	.104	.192	1.280	.206
Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah	.160	.103	.279	1.562	.124
Kompetensi SDM	-.066	.046	-.208	-1.453	.152
Penerapan SAP Berbasis Akrua	.021	.091	.040	.229	.820

Sumber: Data primer, diolah, 2018.

Berdasar Tabel 6 nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,503 artinya persentase pengaruh persepsi manfaat transaksi nontunai, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, kompetensi SDM, dan penerapan SAP berbasis akrua terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 50,3%. Sedangkan sisanya 49,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.734 <sup>a</sup>	.539	.503	1.805

Sumber: Data primer, diolah, 2018.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Signifikansi Simultan (*F-Test*)**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	197.966	4	49.492	15.183	.000 <sup>a</sup>
Residual	169.508	52	3.260		
Total	367.474	56			

Sumber: Data primer, diolah, 2018.

Berdasar Tabel 7 hasil *F-Test* nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa persepsi manfaat transaksi nontunai, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, kompetensi SDM, dan penerapan SAP berbasis akrual secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada tingkat kepercayaan 5%, berdasarkan tabel 8 hasil *t-Test*, dapat disimpulkan bahwa 1) persepsi manfaat transaksi nontunai tidak berpengaruh terhadap

kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Yogyakarta; 2) pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Yogyakarta; 3) kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Yogyakarta; dan 4) penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Yogyakarta.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Signifikansi Parsial (*t-Test*)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13.649	2.899		4.708	.000
Persepsi Manfaat Transaksi Nontunai	.078	.167	.052	.468	.642
1 Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah	.394	.164	.320	2.400	.020
Kompetensi SDM	.119	.073	.175	1.628	.110
Penerapan SAP Berbasis Akrual	.408	.146	.360	2.786	.007

Sumber: Data primer, diolah, 2018.

**Tabel 9**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

Hipotesis	Pernyataan Hipotesis	Hasil
H <sub>1</sub>	Persepsi manfaat transaksi nontunai berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Ditolak
H <sub>2</sub>	Sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Diterima
H <sub>3</sub>	Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Ditolak
H <sub>4</sub>	Penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Diterima
H <sub>5</sub>	Persepsi manfaat transaksi nontunai, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, kompetensi SDM, dan penerapan SAP berbasis akrual secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Diterima

Sumber: Data primer, diolah, 2018.

**PEMBAHASAN**

Berdasar hasil *F-Test* dan *t-Test* pada Tabel 9, maka dijelaskan 1) persepsi manfaat transaksi nontunai tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian (Zahari et al., 2014) bahwa meskipun terdapat persepsi manfaat kemudahan pembayaran elektronik pada pemerintah daerah, ada beberapa kekhawatiran terkait keamanan sistem *online*. (Has-tomo & Aras, 2018) menjelaskan bahwa diperlukan pengetahuan, kepercayaan dan kesiapan sumber daya manusia dalam menerima implementasi transaksi nontunai agar tujuan diterapkannya transaksi nontunai dapat tercapai.

Menurut (Passas, 2018), pembatasan penggunaan kas dengan cara beralih ke pembayaran nontunai tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun semakin modern penggunaan sistem pembayaran dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia, tata kelola dan regulasi yang baik agar tujuan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat tercapai; 2) pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian (Yulianti & Agustini, 2016) bahwa pemanfaatan sistem

informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah telah dimanfaatkan secara optimal dan telah dilengkapi dengan perangkat pendukung guna membantu dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas; 3) kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Nadir & Hasyim, 2017) dan (Hasibuan, 2018) bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. SDM harus meningkatkan kesesuaian tugas dan fungsi yang dijalankannya yang didukung dengan pelatihan yang tepat; 4) penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Bondan et al., 2017).

Penerapan SAP berbasis akrual telah memenuhi tujuannya yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah; dan 5) secara simultan persepsi manfaat transaksi nontunai, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, kompetensi SDM, dan penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh terhadap variabel kualitas LKPD. Teori *stewardship* menjelaskan bahwa pemerintah selaku *steward* akan terus berusaha agar tujuan organisasi



dapat tercapai, yaitu meningkatkan pelayanan dan pertanggungjawaban kepada publik selaku *principal*. Usaha-usaha tersebut antara lain dengan pemanfaatan teknologi pembayaran, teknologi informasi, dan optimalisasi sumber daya manusia serta implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, secara bersama-sama akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam suatu laporan keuangan yang berkualitas.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasar hasil penelitian pada SKPD Kota Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa persepsi manfaat transaksi nontunai dan kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di SKPD Kota Yogyakarta. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di SKPD Kota Yogyakarta. Secara simultan persepsi manfaat transaksi nontunai, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, kompetensi SDM, dan penerapan SAP berbasis akrual secara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di SKPD Kota Yogyakarta.

### Saran

Saran untuk SKPD Kota Yogyakarta adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan sesuai tugas dan fungsi, serta memperhatikan latar belakang pendidikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada SKPD. Selain itu, guna mencapai tujuan transaksi nontunai pada pemerintah daerah, SKPD harus meningkatkan pelatihan atau literasi terkait penggunaan, manfaat dan kemudahan transaksi nontunai. Penelitian selanjutnya dapat memanfaatkan perkembangan teknologi sistem pembayaran sebagai topik menarik untuk dikaji lebih lanjut yang belum dicakup dalam penelitian ini. Selain terkait persepsi manfaat, peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel tingkat penerapan transaksi nontunai sehingga dapat dilihat lebih jelas pengaruh kebijakan transaksi nontunai terhadap kualitas laporan keuangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Atas terselesaikannya penelitian ini, peneliti men-

gucapkan terima kasih kepada Pegawai SKPD Kota Yogyakarta yang telah memberikan izin dan bersedia meluangkan waktu untuk membantu dalam perolehan data penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2008. *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*. Bank Indonesia. Indonesia.
- Bondan, Y., Djamhuri, A., & Rosidi, R. 2017. Kapabilitas Dinamis, Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi pada Pemerintah Kabupaten Kediri). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(2), 82–101. <https://doi.org/10.9744/jak.19.2.82-101>.
- Denison, D. V., Hackbart, M., & Yusuf, J.-E. 2013). Electronic Payments for State Taxes and Fees. *Public Performance & Management Review*, 36(4), 616–636. <https://doi.org/10.2753/PMR1530-9576360406>.
- Emengini, S. E. (2014). Cashless Economy and Financial Statement Reporting in Nigeria. *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*, 2(3), 1–9.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. 2017. *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Hasibuan, S. H. 2018. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Padang Lawas)*. *Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara*. Retrieved from <http://repositori.usu.ac.id>.
- Hastomo, A. D., & Aras, M. 2018. Influence of Cash-

- less Society Socialization toward Trust Transaction Culture in Jakarta, Indonesia. *Humaniora*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v9i1.4174>.
- Nadir, R., & Hasyim. 2017. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi , Kompetensi Sumber Daya Manusia , terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ( Studi Empiris di Pemda Kabupaten Barru ). *Journal FEB Unmul*, 14(1). Retrieved from <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/issue/view/78>.
- Nurilah, A. S. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). Universitas Diponegoro. Retrieved from <http://eprints.undip.ac.id/42846/1/NURILLAH.pdf>.
- Pamungkas, vita putri. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Passas, N. 2018. Report on the debate regarding EU cash payment limitations. *Journal of Financial Crime*, 25(1), 5–27. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2017-0058>.
- Putri, A. 2017. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Daerah. *Jurnal Online Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1). Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12389/12034>.
- Safiyulloh. 2017. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Makassar)*. Universitas Hasanuddin.
- Shaykhutdinov, D. 2017. Non Cash Payment System Bachelor's degree work Non Cash Payment System.
- Silviana, & Antoni, E. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey Pada Pemerintah Kabupaten di Seluruh Jawa Barat. *Jurnal Profita*, 6(1), 24–36.
- Tazmi, R. A. R., Suwarsi, S., & Bayuni, E. M. 2017. Implementasi Sistem Teknologi Pembayaran Virtual Account terhadap Kualitas Tata Kelola Keuangan Syariah ( Studi Survei Yayasan Pendidikan Salman Al-Farisi Bandung ) System Implementation Technology of Virtual Account Against Payment to Quality Islamic Fin. *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 162–167.
- Yulianti, N. L., & Agustini, R. D. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JURNAL BISNIS & EKONOMI*, 14(1), 83–100. <https://doi.org/10.4324/9781315818856>.
- Zahari, R. K., Ariffin, R. N. R., Zamin, N., & Noor, N. binti M. 2014. E-Payment At the Local Government Level: a Study of Majlis Bandaraya Shah Alam and Majlis Daerah Kampar. *Planning Malaysia Journal*, 3, 27–46. <https://doi.org/10.21837/pmjournal.v12.i3.130>.
- Zuria, F. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Sumatra Utara.